

## **Pola-Pola Isi Pemberitaan Media Online mengenai Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama**

**Said Romadlan<sup>1\*</sup>, Mukhlish Muhammad Maududi<sup>2</sup>, Dini Wahdiyati<sup>3</sup>,  
Gilang Kumari Putra<sup>4</sup>, Zulfahmi Yasir Yunan<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Jakarta, Indonesia.

\*Correspondance Author: [saidromadlan@uhamka.ac.id](mailto:saidromadlan@uhamka.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The Government's granting of Special Mining Business Permits for religious community organizations has sparked agreeing and disagreeing attitudes from various circles. Those who agree with this Government policy can equalize the welfare of the people and be fair. Meanwhile, those who disagree consider this policy only for the benefit of the government on the one hand, and can plunge religious organizations themselves. The controversy regarding the acceptance of mine management by religious organizations can also be seen in the patterns of online media reporting. This study focuses on the patterns of online media reporting on the acceptance of mine management by Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU). The research method uses quantitative content analysis with categories of news patterns including the number of news reports, the determination of sources, and the tendency of content. The results of the study show that the patterns of online media coverage on the issue of granting mining business licenses for Muhammadiyah and NU from the number of news reports are relatively large, which shows that this issue is important. The dominant sources are from Muhammadiyah and NU figures, while the tendency of the content is neutral, although there is not much disagreement with the agreement. Here, online media has a dual function, namely as a social integration influenced by media routines, and as a social control determined by the natural function of media ideology.*

**Keywords:** *Patterns of News Content, Online Media, Mining Business License, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.*

### **ABSTRAK**

Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk organisasi kemasyarakatan keagamaan oleh Pemerintah menyulut sikap setuju dan tidak setuju dari berbagai kalangan. Pihak yang setuju memandang kebijakan Pemerintah ini dapat memeratakan kesejahteraan rakyat dan berkeadilan. Sedangkan kalangan yang tidak setuju menilai kebijakan ini hanya untuk kepentingan pemerintah di satu sisi, dan dapat menjerumuskan Ormas-ormas keagamaan itu sendiri. Kontroversi mengenai penerimaan pengelolaan tambang oleh Ormas keagamaan juga dapat dilihat pada pola-pola pemberitaan media-media online. Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada pola-pola pemberitaan media-media online mengenai penerimaan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Metode penelitian menggunakan analisis isi kuantitatif dengan kategori pola-pola pemberitaan meliputi jumlah pemberitaan, penentuan narasumber, dan kecenderungan isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola-pola isi pemberitaan media online pada isu pemberian izin usaha pertambangan bagi Muhammadiyah dan NU dari jumlah pemberitaannya relatif banyak, hal ini menunjukkan isu ini adalah penting. Narasumber yang dominan adalah dari tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU, sedangkan kecenderungan isinya polanya adalah netral, meski tidak berselisih banyak dengan setuju. Di sini, media online berfungsi ganda yaitu sebagai integrasi sosial yang dipengaruhi oleh rutinitas media, dan sebagai kontrol sosial yang ditentukan oleh fungsi alamiah ideologi media.

**Kata Kunci:** Pola-pola Isi Pemberitaan, Media Online, Izin Usaha Pertambangan, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.

## Pendahuluan

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, Ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Persis, PGI, dan Ormas-ormas keagamaan lainnya dapat mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang selama ini diperuntukkan bagi badan usaha milik negara.

Peraturan Pemerintah yang memberikan izin usaha pengelolaan pertambangan oleh Ormas keagamaan tersebut memunculkan polemik dan mendapat berbagai macam tanggapan dari berbagai kalangan. Penolakan tegas datang dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang menilai kebijakan ini hanya sebagai upaya menjinakkan Ormas-ormas keagamaan. JATAM mendesak pemerintah mencabut peraturan pemerintah tersebut, dan meminta Ormas-ormas keagamaan menolak tawaran pemerintah karena menurut JATAM, peraturan pemerintah ini melanggar Undang-undang Minerba, memicu konflik horizontal, dan hanya menjadi alat Perusahaan saja (BBC News Indonesia, 1 Juni 2024).

Penolakan peraturan pemerintah tersebut juga muncul dari kalangan internal

Ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU, serta tokoh agama, dan elit politik, termasuk akademisi. Dari kalangan internal Muhammadiyah muncul penolakan dari salah satu organisasi otonomnya yakni Aisyiyah (detik.com, 26 Juli 2024). Sedangkan dari kalangan NU muncul penolakan dari akar rumput warga NU (Nahdliyin) sendiri yang menilai sikap PBNU “mencla-mencle” berubah-ubah karena dulu mengharamkan kerusakan lingkungan akibat penambangan, tapi sekarang menghalalkan dengan menerima tawaran izin usaha pertambangan yang ditawarkan pemerintah (BBC News Indonesia, 10 Juni 2024).

Ormas-ormas keagamaan sendiri, khususnya Ormas-ormas keagamaan Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis cenderung menerima tawaran izin usaha pertambangan tersebut dengan alasan yang berbeda-beda. NU misalnya menjadi Ormas keagamaan pertama yang menerima izin usaha pertambangan karena NU memang membutuhkan. Sedangkan Muhammadiyah yang pada awalnya sempat gamang akhirnya juga menerima tawaran dari pemerintah dengan pertimbangan untuk mewujudkan pengelolaan pertambangan yang pro-kesejahteraan dan pro-lingkungan. Adapun Persis menerima izin usaha pertambangan karena untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan karena selama ini pengelolaan tambang

hanya menguntungkan pihak tertentu (Tempo.co, 31 Juli 2024). Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mendukung kebijakan Pemerintah Jokowi ini sebagai bentuk fungsi pemerintah melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan rakyat (Detik.com, 3 Juni 2024).

Polemik mengenai pemberian izin usaha pertambangan bagi Ormas-ormas keagamaan juga muncul di media-media massa, termasuk media-media online. Secara umum media-media online memiliki kecenderungan sikap yang berbeda-beda berkaitan dengan isu pemberian izin usaha pertambangan bagi Ormas-ormas keagamaan. Sikap media-media online ini dapat diamati dari pola-pola pemberitaannya seperti jumlah pemberitaan, penentuan narasumber, pemilihan isu, dan kecenderungan isi masing-masing media online. Pola-pola pemberitaan merupakan kecenderungan yang terus-menerus dari sebuah media dalam menampilkan sebuah isu. Pola-pola pemberitaan media biasanya dihubungkan dengan gagasan-gagasan, aktor-aktor, aktivitas-aktivitas, dan pandangan-pandangan yang paling sering dimunculkan oleh media (Shoemaker & Reese, 1996).

Berdasarkan pengamatan awal pada pola-pola pemberitaan media-media online yang diteliti mengenai isu pemberian izin usaha pertambangan bagi Ormas-ormas keagamaan, terlihat pola isi yang cenderung

berbeda. Media online Detik.com misalnya, kecenderungan isi pemberitaannya lebih bersifat netral hanya memberitakan pernyataan dan alasan PBNU dan PP Muhammadiyah menerima tawaran izin usaha pertambangan dari pemerintah.

Berbeda dengan Detik.com, media online Kompas.com dan Tempo.co cenderung kritis dan tidak setuju dengan pemberian izin usaha pertambangan untuk Ormas-ormas keagamaan. Penolakan kedua media online atas peraturan pemerintah yang memberi izin usaha pertambangan untuk Ormas-ormas keagamaan dapat diamati dari berita-berita kedua media online tersebut.

Perbedaan pola-pola pemberitaan media-media online mengenai pemberian izin usaha pertambangan untuk Ormas-ormas keagamaan dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Menurut Shoemaker dan Reese, pola-pola isi pemberitaan media dapat dipengaruhi oleh faktor yaitu (1) faktor individu pekerja media, (2) faktor praktik/rutinitas media, (3) faktor organisasi media, (4) faktor ekstramedia, dan (5) faktor ideologi media (Shoemaker & Reese, 1996). Kajian-kajian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pola-pola isi media seperti pengaruh individu pekerja media dan organisasi media pada pemberitaan Kompas.com dan suaramerdeka.com mengenai citra Ganjar Pranowo dalam

konflik Desa Wadas (Musyaffa & Romadlan, 2023). Pengaruh individu pekerja media juga terlihat pada pemberitaan media online mengenai Perempuan dalam kasus video porno (Hutami & Sjafirah, 2019). Faktor organisasi media juga terlihat memengaruhi pemberitaan media online Kompas.com dan cnnindonesia.com dalam mengonstruksi kekerasan aparat Kepolisian di Desa Wadas (Romadlan & Fauziah, 2022).

Faktor lainnya yang memengaruhi isi media juga dari faktor praktik atau rutinitas media online Kompas.com dan Tirto.id mengenai framing bentrokan antara FPI dan Kepolisian (Romadlan & Wahdiyati, 2022). Selain itu faktor ideologi media juga dapat memengaruhi isi media seperti pengaruh ideologi patriarkhi pada framing Kompas.com mengenai politisi Perempuan (Ningsih et al., 2019). Pengaruh ideologi pada isi media juga terdapat pada pemberitaan media online mengenai Ibu Kota Negara (IKN). Detik.com dipengaruhi ideologi relasi hegemoni penguasa dengan media, sedangkan Kompas.com, dan Tempo.co dipengaruhi ideologi demokratisasi (Marsun et al., 2023).

Selama ini Muhammadiyah dan NU dikenal sebagai organisasi Islam berhaluan moderat yang lebih banyak memfokuskan program-programnya pada bidang pendidikan, pesantren, dan kesehatan, dan program-program pemberdayaan

masyarakat lainnya melalui Lembaga-lembaga yang mereka miliki (Barton, 2014). Kedua organisasi Islam ini juga dikenal sebagai kekuatan civil Islam yang memiliki perhatian kuat pada demokrasi di Indonesia (Hefner, 2001; Sutley & Hefner, 2001; van Bruinessen, 2003).

Di sisi yang lain, Muhammadiyah dan NU dengan doktrin Islam Berkemajuan dan Islam Nusantara, dipandang juga sebagai organisasi Islam yang memperjuangkan upaya-upaya pelestarian lingkungan, dan menolak segala bentuk perusakan lingkungan, salah satunya melalui berbagai bentuk izin pertambangan. Maka dari itu, penerimaan izin usaha pertambangan oleh Muhammadiyah dan NU ini dinilai sebagai pengingkaran doktrin yang mereka perjuangkan selama ini. Pada titik inilah keputusan kedua organisasi Islam ini banyak ditentang, bahkan oleh kalangan internal mereka sendiri dan oleh kalangan-kalangan lain termasuk dari media massa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan penelitian ini adalah Pertama, bagaimana pola-pola isi pemberitaan media online mengenai penerimaan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dan NU? Kedua, apa faktor yang memengaruhi pola-pola isi pemberitaan media online mengenai penerimaan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dan NU?

Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep pola-pola isi media dan teori hirarkhi pengaruh isi media. Pola-pola isi media adalah kecenderungan yang terus-menerus suatu media dalam memberitakan sebuah peristiwa. Pola-pola isi media selalu dikaitkan dengan ide-ide, orang-orang, aktivitas-aktivitas, dan pandangan-pandangan yang paling sering dimunculkan oleh media. Bentuk-bentuk pola-pola isi media di antaranya adalah (1) pola-pola isi media yang berkaitan dengan bias politik (*political bias*), yakni kecenderungan secara konsisten untuk menyimpang dari kebenaran obyektif, (2) pola-pola isi media yang berkaitan dengan perilaku, salah satunya adalah perilaku kekerasan (*violence*), (3) pola-pola isi media yang berkaitan dengan sumber berita dan isu berita, dan (4) pola-pola isi yang berhubungan dengan geografi (Shoemaker & Reese, 1996).

Adapun teori hirarkhi pengaruh isi media menjelaskan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi isi media. Terdapat lima faktor yang secara hirarkhis, dari level mikro sampai pada level makro yang memengaruhi isi media, yaitu (1) faktor individu pekerja media, (2) faktor praktik/rutinitas media, (3) faktor organisasi media, (4) faktor ekstramedia, dan (5) faktor ideologi media.

Lingkup penelitian ini meliputi pola-pola pemberitaan media online, Muhammadiyah dan NU, serta isu mengenai izin usaha pertambangan. Maka sebagai *state of the art*, terdapat kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan lingkup kajian ini, seperti kajian mengenai pengaruh ideologi moderatisme pada pola-pola isi media online mengenai Pemilu 2024 (Romadlan, 2024). Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya mengenai pola-pola isi media online mengenai Pemilu 2024 memakai analisis isi kualitatif, sedangkan penelitian ini fokusnya pada isu izin usaha pertambangan bagi Ormas-ormas keagamaan dengan analisis isi kuantitatif.

Penelitian sebelumnya mengenai izin usaha pertambangan bagi Ormas-ormas keagamaan dengan sudut pandang yang berbeda-beda, seperti mengenai dampak sosial-ekonomi pemberian izin usaha tambang kepada Ormas NU (Sholahudin & Maksum, 2024). Selain itu, terdapat juga tinjauan dari aspek regulasi PP Nomor 25 Tahun 2024 mengenai pemberian izin usaha pertambangan bagi Ormas-ormas keagamaan di Indonesia (Prastika et al., 2024), dan mengenai penerapan PP Nomor 25 Tahun 2024 untuk kesejahteraan Masyarakat (Apriyanto & Maruf, 2024). Terdapat pula studi mengenai pemberian izin usaha pertambangan bagi Ormas-ormas keagamaan dari sudut pandang potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

(Putera, 2024). Studi-studi tersebut memang mengenai pemberian izin usaha pertambangan bagi Ormas-ormas keagamaan dari berbagai kajian atau sudut pandang, sedangkan penelitian ini menganalisis masalah ini dengan sudut pandang pemberitaan media-media online.

Penelitian ini memiliki urgensi pada pentingnya pertimbangan dalam memberikan izin usaha pertambangan bagi Ormas-ormas keagamaan terutama dari media massa sebagai Lembaga kontrol sosial atas kebijakan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pengingat bagi Ormas-ormas agar lebih berhati-hati dalam menerima izin usaha pertambangan dari pemerintah agar tidak mengingkari doktrin yang mereka perjuangkan sendiri selama ini. Sedangkan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pemilihan isu yang diteliti yakni mengenai pemberian izin usaha pertambangan oleh Ormas-ormas keagamaan, khususnya Muhammadiyah dan NU di media online, yang belum banyak diteliti. Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan metode penelitian analisis isi kuantitatif yang digabungkan dengan kajian pustaka sehingga hasil kajiannya lebih mendalam, tidak sekadar pada isi yang nampak saja tapi juga mengkaji apa makna di balik sebuah isi (teks).

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis isi kuantitatif. Menurut Barelson analisis isi adalah suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis isi komunikasi secara obyektif, sistematis, dan biasanya menggunakan kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak (Kaid, 1989). Sedangkan menurut Krippendorff, analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih data dengan memerhatikan konteksnya (Krippendorff, 1993). Analisis isi kuantitatif dianggap tepat digunakan karena karakteristiknya yang sistematis, obyektif, kuantitatif, manifes, dan perangkuman (Eriyanto, 2011, 2019), sehingga sesuai dengan permasalahan penelitian.

Media online yang dipilih adalah Detik.com, Kompas.com. dan Tempo.co dengan pertimbangan ketiga media online tersebut dipersepsikan tajam dan kritis oleh audiens (Kompas.com, 14/09/2023), dan termasuk media online yang sering diakses masyarakat (detik.com, 18/07/2023). Di samping itu, ketiga media online ini dipandang sebagai pelopor media-media online (berbasis internet) di Indonesia. Detik.com merupakan salah satu pelopor media online di Indonesia yang berdiri sejak 9 Juli 1998 yang nama diambil dari Tabloid DeTik. Sejak 3 Agustus 2011 Detik.com

diakusisi oleh CT Corp di bawah naungan Trans Corp. Sedangkan Kompas.com awalnya merupakan versi *online* dari Surat Kabar Kompas dengan nama Kompas Online pada 14 September 1995. Saat ini Kompas.com merupakan media online yang sudah *establish* dan terpercaya, dengan jargon jurnalisme presisi (Latief, 2018). Adapun Tempo.co merupakan media online yang didirikan oleh PT Tempo Inti Media, dengan nama awal tempointeraktif pada tahun 1996 yang kemudian menjadi pionir juga media berita berbasis internet di Indonesia.

Unit analisisnya adalah berita-berita media online Detik.com, Kompas.com. dan Tempo.co mengenai isu pemberian izin usaha pertambangan bagi Ormas-ormas keagamaan yakni Muhammadiyah dan NU. Rentang waktu pemberitaan ditentukan bulan Juni-Juli 2024, karena pada rentang waktu ini isu mengenai izin usaha pertambangan bagi Ormas-ormas keagamaan sedang banyak diberita oleh media. Unit pengamatannya meliputi judul, isi berita, narasumber, dan foto. Untuk kategori pola-pola pemberitaan mencakup jumlah berita, penentuan narasumber, dan kecenderungan isi.

Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan kajian Pustaka (*literature review*). Dokumentasi adalah data yang berbentuk seperti dokumen pribadi, data-data administrasi, dokumen berkala, dan

berita-berita media massa (Eriyanto, 2019). Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk berita-berita media online mengenai izin usaha pertambangan bagi Ormas-ormas keagamaan. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data tentang konteks penelitian yang dilakukan (Berger, 2011). Dalam penelitian ini kajian pustaka dipakai untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menentukan pola-pola pemberitaan media online mengenai izin usaha pertambangan bagi Ormas-ormas keagamaan.

Untuk analisis data memakai analisis isi kuantitatif yang meliputi analisis isi/teks, dan analisis konteks. Analisis isi/teks digunakan untuk menjelaskan pola-pola pemberitaan media online mengenai izin usaha pertambangan bagi Ormas-ormas keagamaan. Analisis konteks dipakai untuk menjelaskan faktor-faktor yang menentukan pola-pola pemberitaan media online mengenai izin usaha pertambangan bagi Ormas-ormas keagamaan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pola-pola pemberitaan dikategorikan dalam tiga kategori yaitu frekuensi pemberitaan, penentuan narasumber, dan kecenderungan ini.

### 1. Frekuensi Pemberitaan

Frekuensi (jumlah) berita menunjukkan penting tidaknya sebuah isu

diberitakan oleh media. Semakin banyak sebuah isu diberitakan maka semakin pentinglah isu tersebut bagi media, sebaliknya semakin sedikit suatu isu diberitakan media maka semakin tidak penting isu tersebut.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa frekuensi berita media-media online mengenai isu izin usaha pertambangan bagi Muhammadiyah dan NU selama bulan Juni-Juli 2024 sebanyak 92 berita. Tempo.co menjadi media online yang terbanyak memberitakan isu ini yaitu 34 berita atau sebesar 37% dibandingkan dengan Kompas.com 32 berita (35%) dan detik.com 26 berita (28%). Pola-pola pemberitaan kategori frekuensi berita ini menunjukkan bahwa isu mengenai izin usaha pertambangan untuk Ormas keagamaan, khususnya Muhammadiyah dan NU adalah isu yang penting bagi media. Di antara ketiga media online tersebut, tempo.co merupakan media online yang menganggap isu ini paling penting karena jumlah beritanya paling banyak.

Berkaitan dengan isu izin usaha pertambangan bagi Muhammadiyah dan NU, media-media online memberitakannya dengan frekuensi berita sebagai berikut:

Tabel 1. Frekuensi Berita Media Online mengenai Isu Izin Usaha Pertambangan bagi Muhammadiyah dan NU

Media Online	Frekuensi Berita	
	Frekuensi	Prosentase
detik.com	26	28%
Kompas.com	32	35%

Media Online	Frekuensi Berita	Frekuensi	Prosentase
tempo.co	34	37%	
Jumlah	92	100%	

*Sumber: diolah dari data penelitian.*

## Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber mengindikasikan kecenderungan media dalam memandang sebuah isu, dari mana isu tersebut dilihat dan dengan cara seperti apa. Pada isu kebijakan pemerintah misalnya, penentuan narasumber-narasumber dari kalangan pejabat pemerintah akan menunjukkan kecenderungan isi media yang mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Sebaliknya, penentuan narasumber-narasumber dari kalangan luar pemerintah seperti aktivis LSM dan akademisi akan menunjukkan kecenderungan isi media yang lebih kritis atau tidak mendukung kebijakan pemerintah.

Berdasarkan tabel 2, narasumber-narasumber yang digunakan oleh media-media online dalam memberitakan mengenai isu izin usaha pertambangan bagi Muhammadiyah dan NU selama bulan Juni-Juli 2024 terdiri atas berbagai kalangan seperti pejabat pemerintah, tokoh Muhammadiyah dan NU, tokoh Ormas lain, tokoh partai politik, dan akademisi serta aktivis LSM. Secara lebih rinci dapat dilihat juga pola penentuan narasumber setiap media yang cenderung memiliki pola yang

serupa meskipun dengan jumlah narasumber yang berbeda. Terlihat pada tabel 2, Detik.com menampilkan 33 narasumber atau 23% dari total narasumber yang digunakan oleh ketiga media online, di mana narasumber yang paling sering muncul adalah dari tokoh Muhammadiyah, yakni 14 narasumber atau 42%, tokoh NU 7 (21%), dan tokoh Ormas lain, 4 (12%).

Sedangkan Kompas.com memunculkan narasumber yang lebih banyak dari detik.com, yaitu 49 narasumber atau 33%, dengan narasumber paling banyak dari tokoh Muhammadiyah yaitu 28 narasumber atau sebesar 57%, tokoh NU 9 narasumber (18%), dan pejabat pemerintah sebanyak 5 (10%). Adapun tempo.co jumlah narasumber paling banyak, yaitu 64 narasumber (44%). Narasumber yang paling banyak dikutip tempo.co adalah dari tokoh Muhammadiyah sebanyak 27 narasumber (42%), tokoh Ormas lain 12

narasumber (19%), dan pejabat pemerintah sebanyak 9 narasumber (14%).

Secara keseluruhan, narasumber yang digunakan oleh ketiga media online dalam memberitakan mengenai isu izin usaha pertambangan bagi Muhammadiyah dan NU adalah dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, yaitu 69 narasumber (47%), tokoh NU, 23 narasumber (16%), dan pejabat pemerintah dan tokoh Ormas lain masing-masing 17 narasumber (12%). Tokoh Muhammadiyah yang banyak ditampilkan media online adalah Abdul Mu'ti, Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Adapun tokoh NU yang banyak muncul adalah Ketua Umum PBNNU Yahya Cholil Staquf. Sedangkan pejabat pemerintah yang sering menjadi narasumber adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Presiden Joko Widodo.

Pola-pola pemberitaan dalam kategori penentuan narasumber

Tabel 2. Penentuan Narasumber Berita Media Online mengenai Isu Izin Usaha Pertambangan bagi Muhammadiyah dan NU

Narasumber	Media Online			Jumlah
	detik.com	Kompas.com	tempo.co	
Pejabat Pemerintah	3 (9%)	5 (10%)	9 (14%)	17 (12%)
Tokoh Muhammadiyah	14 (42%)	28 (57%)	27 (42%)	69 (47%)
Tokoh NU	7 (21%)	9 (18%)	7 (11%)	23 (16%)
Tokoh Ormas Lain	4 (12%)	1 (2%)	12 (19%)	17 (12%)
Tokoh Partai Politik	2 (6%)	2 (4%)	3 (5%)	7 (5%)
Akademisi	1 (3%)	2 (4%)	2 (3%)	5 (3%)
Aktivis LSM	0 (0%)	2 (4%)	4 (6%)	6 (4%)
Lain-lainnya	2 (6%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (1%)
Jumlah	33 (23%)	49 (33%)	64 (44%)	146 (100%)

Sumber: diolah dari data penelitian.

sebagaimana terlihat pada tabel 2 menunjukkan bahwa dalam memberitakan mengenai mengenai isu izin usaha pertambangan bagi Muhammadiyah dan NU media-media online lebih menekankan sudut pandang kalangan internal organisasi penerima izin usaha pertambangan, yakni Muhammadiyah dan NU, dan pejabat pemerintah yang memberi izin usaha pertambangan. Maka dari itu, dilihat dari penentuan narasumber ini media online cenderung setuju dengan kebijakan pemerintah ini. Meskipun terdapat juga narasumber dari kalangan luar organisasi Muhammadiyah dan NU seperti aktivis LSM, tokoh partai politik, dan akademisi tapi jumlahnya sedikit sehingga tidak terlalu memengaruhi kecenderungan pemberitaan media-media online.

## 2. Kecenderungan Isi

Kecenderungan isi menunjukkan sikap atau posisi media terhadap sebuah isu. Secara umum kecenderungan isi media

Ormas-ormas keagamaan sebagai contohnya, kecenderungan isi setuju berarti media setuju atau mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Sebaliknya, kecenderungan isi tidak setuju berarti media tidak setuju atau tidak mendukung kebijakan pemerintah itu yang dapat dilihat dari judul berita, isi berita, dan pernyataan narasumber. Sedangkan kecenderungan isi netral bila judul berita, isi berita, dan pernyataan narasumber lebih bersifat netral, berimbang dan tidak cenderung setuju atau tidak setuju.

Berdasarkan pengamatan pada judul, isi, dan pernyataan narasumber, dapat ditentukan kecenderungan isi media online mengenai isu pemberian izin usaha pertambangan bagi Muhammadiyah dan NU. Media online detik.com cenderung lebih netral, yakni 14 berita atau 54%, meskipun di sisi yang lain detik.com lebih cenderung tidak setuju, 7 berita (27%) daripada yang cenderung setuju, 5 berita

Tabel 3. Kecenderungan Isi Berita Media Online mengenai Isu Izin Usaha Pertambangan bagi Muhammadiyah dan NU

Kecenderungan Isi	detik.com	Media Online Kompas.com	tempo.co	Jumlah
Setuju	5 (19%)	14 (44%)	16 (47%)	35 (38%)
Tidak setuju	7 (27%)	9 (28%)	4 (12%)	20 (22%)
Netral	14 (54%)	9 (28%)	14 (41%)	37 (40%)
Jumlah	26 (100%)	32 (100%)	34 (100%)	92 (100%)

*Sumber: diolah dari data penelitian.*

dapat dikategorikan pada sikap setuju, tidak setuju, dan netral. Pada isu mengenai pemberian izin usaha pertambangan untuk

(19%). Sedangkan Kompas.com kecenderungan isinya adalah setuju, yakni 14 berita (44%), meskipun kecenderungan

isi yang tidak setuju juga relatif tinggi yakni 9 berita (28%), sama dengan kecenderungan isi yang netral, 9 berita (28%). Adapun tempo.co kecenderungan isinya juga setuju, yaitu 16 berita (47%), tidak berselisih jauh dari yang netral 14 berita (41%), dan tidak setuju hanya 4 berita (12%).

Secara keseluruhan kecenderungan isi media online dalam pemberitaannya mengenai pemberian izin usaha pertambangan untuk Muhammadiyah dan NU adalah cenderung netral, yakni 37 berita (40%), meskipun tidak berselisih jauh dengan kecenderungan isi yang setuju, yakni 35 berita (38%). Sedangkan kecenderungan isi yang tidak setuju adalah 20 berita (22%).

Pola-pola pemberitaan media online berdasarkan kategori kecenderungan isi media online yang cenderung netral tersebut menunjukkan sikap media online yang lebih proposisional dalam menyikapi isu pemberian izin usaha pertambangan untuk Ormas-ormas keagamaan ini. Meskipun demikian, di sisi yang lain media-media online juga mencoba menampilkan pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah ini, walaupun tidak sebanyak yang netral dan yang setuju.

Kecenderungan isi media-media online dalam pemberitaannya mengenai pemberian izin usaha pertambangan untuk

Muhammadiyah dan NU secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

### **Fungsi Media Online: Integrasi Sosial vs Kontrol Sosial**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola-pola isi pemberitaan media online mengenai isu pemberian izin usaha pertambangan bagi Ormas keagamaan Muhammadiyah dan NU dari kategori frekuensi pemberitaan berjumlah 92 berita. Sedangkan pola-pola isi pemberitaan kategori penentuan narasumber terlihat tokoh Muhammadiyah (47%) dan NU (16%) dominan sebagai narasumber media-media online. Adapun pada kategori kecenderungan isi terlihat pola-pola isi media online cenderung netral yakni 40%, meskipun selisihnya tidak jauh dari kecenderungan isi yang setuju (38%).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 mengenai pemberian izin usaha pertambangan untuk Ormas-ormas keagamaan memang sejak awal memicu kontroversi karena dianggap dapat menjerumuskan Ormas keagamaan yang memang tidak memiliki kompetensinya di bidang pertambangan. Terdapat Ormas-ormas keagamaan yang menolak pemberian izin usaha pertambangan ini seperti Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI). Sedangkan Ormas-ormas keagamaan

yang menerima di antaranya adalah NU, Muhammadiyah, dan Persis. Di sisi yang lain, penolakan pemberian izin usaha pertambangan untuk Ormas-ormas keagamaan juga disuarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti JATAM, Jaringan Gusdurian, Aisyiyah, akademisi, dan beberapa kalangan internal Muhammadiyah dan NU.

Pro dan kontra pemberian izin usaha pertambangan untuk Ormas-ormas keagamaan juga menjadi isu yang hangat di media online. Berdasarkan hasil penelitian, selama rentang waktu bulan Juni-Juli 2024 tercatat 92 berita dari 3 media online yang diteliti yang menampilkan isu pemberian izin usaha pertambangan khususnya untuk Muhammadiyah dan NU. Dari jumlah tersebut, meskipun terlihat kecenderungan isinya adalah netral dan setuju atas pemberian izin usaha pertambangan untuk Muhammadiyah dan NU, namun terdapat pula berita-berita yang cenderung tidak setuju. Hal ini juga terlihat pada penentuan narasumber yang dipilih media online yang banyak juga menampilkan narasumber dari tokoh ormas keagamaan lain selain NU dan Muhammadiyah, tokoh partai politik, akademisi, dan aktivis LSM yang pernyataannya terlihat lebih cenderung tidak setuju dengan pemberian izin usaha pertambangan untuk Muhammadiyah dan NU.

Pola-pola isi pemberitaan media online mengenai pemberian izin usaha pertambangan untuk Muhammadiyah dan NU menunjukkan dua sisi yang berbeda dari peran dan fungsi media online. Pertama, media online memiliki fungsi sebagai pemberi informasi dan berperan menjaga situasi dan kondisi yang kondusif dan harmonis. Hal ini terlihat dari kecenderungan isi media online yang cenderung netral dan setuju dengan pemberian izin usaha pertambangan untuk Muhammadiyah dan NU. Kedua, media online sebagai media massa juga menunjukkan fungsinya sebagai kontrol sosial atas permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Fungsi ini terlihat dari kecenderungan isi media online yang tidak setuju dengan pemberian izin usaha pertambangan untuk Muhammadiyah dan NU.

Fungsi media online sebagai pemberi informasi merupakan fungsi media yang sesuai dengan pandangan Fungsionalisme bahwa media merupakan kekuatan untuk integrasi sosial, sehingga isi-isi media sering cenderung untuk kompromi dan mendukung daripada mengkritik. Hal ini karena di dalam masyarakat, media merupakan salah satu sistem yang terkait dengan sistem lain yang berfungsi menjaga ketertiban dan keberlanjutan masyarakat (Donohue et al., 1973). Selain berfungsi sebagai pemberi

informasi, media massa dalam pandangan Fungsionalisme memiliki fungsi di masyarakat sebagai korelasi, keberlanjutan, hiburan, dan mobilisasi (McQuail, 2010). Fungsi-fungsi lainnya antara lain membentuk opini publik, mengontrol kekuasaan, memperkuat identitas budaya, dan menjaga kebebasan pers (Syaputra & Sabri, 2023).

Fungsi informasi yang menjadi penekanan media online pada isu pemberian izin usaha pertambangan untuk Muhammadiyah dan NU menunjukkan posisi yang netral dari media online karena pertimbangan atau pengaruh dari rutinitas media (*media routines*). Rutinitas media dapat dipilah menjadi tiga bagian, yaitu konsumen (audiens), prosesor (organisasi media), dan supplier (sumber eksternal). Salah satu unsur penting yang menjadi perhatian media adalah bagaimana menarik perhatian audien, di mana salah satu caranya adalah dengan menampilkan berita-berita yang memiliki nilai (*news values*). Nilai-nilai berita di antaranya meliputi kepentingan (*importance*), mengandung daya tarik (*human interest*), mengadung konflik/kontroversi, di luar kebiasaan (*unusual*), garis waktu (*timelines*), dan kedekatan (*proximity*) (Shoemaker & Reese, 1996).

Isu penerimaan pemberian izin usaha pertambangan oleh Muhammadiyah dan NU jelas memiliki nilai berita karena di

dalamnya mengandung permasalahan penting (*importance*), yang menyangkut kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu juga mengandung kontroversi dan konflik karena terdapat pandangan yang berbeda dari berbagai kalangan mengenai pemberian izin usaha pertambangan untuk Muhammadiyah dan NU ini. Maka dari itu, pola-pola isi pemberitaan media online mengenai pemberian izin usaha pertambangan ini dipengaruhi oleh rutinitas media.

Di samping fungsi informasi untuk menjaga integrasi sosial, pola-pola isi pemberitaan media online mengenai pemberian izin usaha pertambangan untuk Muhammadiyah dan NU juga menunjukkan fungsi kontrol sosial dari media online. Dalam hal ini media-media online memberikan kritik atas penerimaan pemberian izin usaha pertambangan oleh Muhammadiyah dan NU. Kritik media online ini merupakan bentuk kekuwatiran karena selama ini Ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU tidak memiliki pengalaman mengelola pertambangan. Di samping itu, Muhammadiyah dan NU selama ini dikenal memiliki perhatian yang kuat atas pelestarian lingkungan, dan menolak pengerusakan lingkungan termasuk melalui pertambangan. Maka dari itu, ketika kedua Ormas keagamaan terbesar di Indonesia ini menerima pemberian izin usaha pertambangan berarti mengingkari

doktrin yang mereka pegang teguh selama ini.

Fungsi kontrol sosial media online terhadap penerimaan pemberian izin usaha pertambangan oleh Muhammadiyah dan NU ditunjukkan melalui kecenderungan yang tidak setuju dengan penerimaan izin usaha pertambangan kedua Ormas keagamaan tersebut. Kontrol sosial media merupakan fungsi alamiah sebuah ideologi sebagai mekanisme integrasi sosial, dan sebagai upaya untuk menjaga batas-batas budaya yang diterima dan yang keluar dari legitimasi (Shoemaker & Reese, 1996). Isu penerimaan pemberian izin usaha pertambangan oleh Muhammadiyah dan NU merupakan isu yang berada pada ranah kontroversi, yaitu adanya pertentangan atau perbedaan pandangan yang ditampilkan oleh media online. Fungsi kontrol sosial media dapat juga digunakan untuk mengurangi konflik antara pemerintah dan masyarakat (Setiadarma & Priambodo, 2023).

Pola-pola isi pemberitaan media online mengenai penerimaan pemberian izin usaha pertambangan oleh Muhammadiyah dan NU memperkuat peran dan fungsi media online sebagai media massa yang berfungsi untuk integrasi sosial dan kontrol sosial. Fungsi integrasi sosial ditunjukkan melalui pola-pola isi yang cenderung netral dan setuju dengan penerimaan pemberian izin usaha

pertambangan oleh Muhammadiyah dan NU. Sedangkan peran kontrol sosial, yang merupakan perwujudan fungsi alamiah ideologi media, diperlihatkan melalui kecenderungan isi yang tidak setuju atas penerimaan pemberian izin usaha pertambangan oleh Muhammadiyah dan NU.

## Penutup

Pola-pola isi pemberitaan media online mengenai isu pemberian izin usaha pertambangan bagi Ormas keagamaan Muhammadiyah dan NU dari kategori frekuensi pemberitaan berjumlah 92 berita. Sedangkan berdasarkan kategori penentuan narasumber didominasi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah (47%) dan NU (16%). Adapun pada kategori kecenderungan isi terlihat pola-pola isi media online cenderung netral yakni 40%, meskipun selisihnya tidak jauh dari kecenderungan isi yang setuju (38%).

Faktor-faktor yang menentukan pola-pola isi pemberitaan media online mengenai isu pemberian izin usaha pertambangan bagi Ormas keagamaan Muhammadiyah dan NU adalah faktor rutinitas media, terutama pada aspek konsumen (audiens), dan faktor ideologi media yang diwujudkan dalam bentuk kontrol sosial. Di samping itu, pola-pola isi pemberitaan media online ini juga memperkuat peran dan fungsi media online

sebagai media massa yang berfungsi untuk integrasi sosial dan kontrol sosial. Fungsi integrasi sosial ditunjukkan melalui pola-pola isi yang cenderung netral dan setuju, sedangkan peran kontrol sosial diperlihatkan melalui kecenderungan isi yang tidak setuju atas penerimaan pemberian izin usaha pertambangan oleh Muhammadiyah dan NU.

Sebagai rekomendasi untuk penelitian-penelitian serupa berikutnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing atau analisis wacana kritis untuk mengungkapkan lebih jelas keterkaitannya dengan kepentingan kekuasaan atau ideologi pada pemberitaan media online mengenai isu pemberian izin usaha pertambangan bagi Ormas keagamaan Muhammadiyah dan NU ini. Untuk media online hendaknya dapat lebih berperan dalam kontrol sosial atas isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Apriyanto, D., & Maruf, S. N. A. (2024). Implementasi Kesejahteraan Masyarakat dalam Prioritas WIUPK untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 367–380.
- Barton, G. (2014). The Gülen Movement, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama: Progressive Islamic Thought, Religious Philanthropy and Civil Society in Turkey and Indonesia.
- Islam and Christian–Muslim Relations*, 25(3), 287–301. <https://doi.org/10.1080/09596410.2014.916124>
- Berger, A. A. (2011). *Media and Communication Research Methods an Introduction to Qualitative and Quantitative Approach* (2nd ed.). Singapore: Sage.
- Donohue, G. A., Tichenor, P. J., & Olien, C. N. (1973). Mass Media Functions, Knowledge and Social Control. *Journalism Quarterly*, 50(4), 652–659. <https://doi.org/10.1177/107769907305000404>
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Eriyanto. (2019). *Metode Penelitian Komunikasi* (3rd ed.). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hefner, R. W. (2001). *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia*. (Ahmad Baso). Jakarta: Institute Studi Arus Informasi (ISAI) dan The Asia Foundation (TAF).
- Hutami, M. F., & Sjafirah, N. A. (2019). Framing Media Online Tribunnews.Com Terhadap Sosok Perempuan Dalam Berita Video Pornografi Depok. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 2(1), 25–43. <https://doi.org/10.24198/kj.v2i1.21072>
- Kaid, L. L. (1989). Content Analysis. In P. Emmert & L. L. Barker (Eds.), *Measurement of Communication Behavior* (pp. 197–213). New York & London Longman Publisher.
- Krippendorf, K. (1993). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*.

- Jakarta: Rajawali Press.
- Latief, R. (2018). Penerapan Jurnalisme Pressisi Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnalisa*, 04(1), 46–60.  
<http://103.55.216.56/index.php/jurnalisa/article/view/5620>
- Marsun, F., Karo, S. B., & Wirasati, W. (2023). Ideologi Media pada Pemberitaan Nusantara Sebagai Ibu Kota Baru Indonesia. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(1), 42–50.  
<https://doi.org/10.36451/jisip.v19i1.67>
- McQuail, D. (2010). *Mass Communication Theory* (6th ed.). London, Sage Publication.
- Musyaffa, A., & Romadlan, S. (2023). Citra Ganjar Pranowo dalam Konflik Desa Wadas Di Media Online. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 15(1), 98–117.  
<https://journals.ums.ac.id/index.php/komuniti/article/view/21788%0Ahttp://dx.doi.org/10.23917/komuniti.v15i1.21788%0A>
- Ningsih, S., Zubair, A., & Gusfa, H. (2019). Indonesian Women Politicians Based on a Newspaper's Perception. *Proceedings of the First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)*, 343, 480–486.  
<https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.99>
- Prastika, A., Mutiara Fajriatul Izza Putri, & Viorelia Nabilah Tasya. (2024). Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan “Keagamaan” di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(02), 214–224.
- <https://doi.org/10.54298/tarunlaw.v2i02.216>
- Putera, I. R. (2024). Dinamika Pemberian Izin Pertambangan kepada Organisasi Kemasyarakatan “Keagamaan” dalam Sudut Pandang Potensi Pelanggaran HAM. *KULTURA Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(8), 239–247.
- Romadlan, S. (2024). Pola Konten Pemberitaan Pemilu 2024 dan Ideologi Moderatisme di Media Keislaman Online. *Jurnal Komunikasi Islam*, 14(1), 46–70.  
<https://doi.org/10.15642/jki.2024.14.1.46-70>
- Romadlan, S., & Fauziah, I. (2022). Konstruksi Realitas Media Online mengenai Kekerasan Aparat Kepolisian di Desa Wadas, Jawa Tengah. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 26(1), 53–70.  
<https://doi.org/10.17933/jskm.2022.4954>
- Romadlan, S., & Wahdiyati, D. (2022). Framing Pemberitaan Media Online mengenai Bentrokan Anggota Front Pembela Islam ( FPI ) dengan Anggota Kepolisian. *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 262–278.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Finteraksi.v6i2.10135> E-ISSN: 2615-5200
- Setiadarma, W., & Priambodo, B. (2023). Peran Media Sebagai Kontrol Sosial dalam Mengurai Konflik masyarakat dengan Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (MPKM)*, 2(2), 1–4.  
<https://www.ejournal-rmg.org/index.php/AMPKM/article/view/162>
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (1996). *Mediating the Message Theories of Influences on Mass Media Content* (2nd ed.). New York, Longman

Publisher.

Sholahudin, T., & Maksum, M. N. R. (2024). Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(2), 672–682. <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.516>

Sutley, S., & Hefner, R. W. (2001). Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia. *Pacific Affairs*, 74(3), 459. <https://doi.org/10.2307/3557788>

Syaputra, I., & Sabri, Y. (2023). The Role and Function of Media Institutions in Society in the Digital Age: A Case Study in Indonesia. *Journal of Social,*

*Media, Communication, and Journalism*, 63.

<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/semantik/index>

van Bruinessen, M. (2003). Post-Soeharto Muslim Engagements with Civil Society and Democratization. *English*, 33. [http://www.let.uu.nl/~Martin.vanBruinessen/personal/publications/Post\\_Suharto\\_Islam\\_and\\_civil\\_society.htm](http://www.let.uu.nl/~Martin.vanBruinessen/personal/publications/Post_Suharto_Islam_and_civil_society.htm)